

Tahun Lalu Opini Tidak Wajar 2012, Melawi Raih WDP

Borneo Tribune: Nanga Pinoh

KABUPATEN MELAWI berhasil mencatatkan prestasi lebih baik setelah di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2012. Melawi Wajar Dengan Pengucualian (WDP) dari BPK.

Hasil ini merupakan peningkatan dari hasil pemeriksaan keuangan daerah beberapa tahun sebelumnya yang seringkali mendapatkan opini Disclaimer atau Tidak Wajar.

Wakil Bupati Melawi, Panji mengatakan, opini WDP terhadap keuangan daerah Melawi ini bahkan merupakan yang pertama kalinya diperoleh. Pada tahun sebelumnya mendapatkan 'opini Tidak Wajar' dari BPK.

"Jadi patut kita syukuri, karena berarti ada peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selama ada niat dan kerja keras, tentunya laporan keuangan daerah akan semakin membaik ke depannya," ujar Panji.

Wabup Panji bersama Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Abang Tajudin menerima langsung hasil pemeriksaan LKPD Melawi di Gedung BPK RI Perwakilan Kalbar di



PEMERIKSAAN BPK RI. Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Abang Tajudin didampingi Wabup Panji menerima laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Melawi tahun anggaran 2012. FOTO: Istimedia

Pontianak. Menurutnya, sesuai dengan arahan Kepala Perwakilan BPK RI, Adi Sudibyo yang meminta agar prestasi ini bisa dipertahankan, bahkan meningkat ke arah yang lebih baik. Seperti Wajar Tanpa Pengucualian (WTP).

"Selama kita berkeinginan ke arah sana (mendapat opini WTP, red) tentunya ini harus sama-sama bekerja keras. Perlu ada sinergisitas antarinstansi di jajaran Pemkab Melawi. Agar nantinya opini WTP

pada tahun mendatang bisa kita dapatkan," harapnya.

Di sisi lain, sambung Panji, LKPD Melawi tetap masih memiliki kekurangan sehingga persoalan administrasi. Niat untuk bikin beberapa temuan yang menjadi catatan BPK sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan keuangan daerah. Catatan tersebut, kata dia, bukan muncul karena adanya sejumlah kesalahan yang disengaja, tapi juga bisa dikarenakan ketidapkahaman pegawai sehingga perlu diperbaiki

"Jangan bosan-bosan melakukan evaluasi agar kita bisa mendapatkan WTP pada tahun mendatang. Saya pun mengucapkan terima kasih pada pegawai serta masyarakat yang sudah mendukung pemerintahan termasuk media sehingga opini kita naik pada tahun ini," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Abang Tajudin memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Melawi meraih opini WDP. Menurutnya, prestasi ini patut diacungi jempol setelah beberapa tahun terakhir Melawi hanya menyangand opini disclaimer dan Tidak Wajar dari BPK RI.

"Naiknya status harusnya menjadi pemacu kita untuk terus bekerja. Minimal mempertahankannya dan kalau bisa meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengucualian (WTP)," katanya.

Dia berpendapat, Pemkab Melawi harus lebih teliti menata aset dan mengelola keuangan yang lebih baik. Pasalnya jika tidak, maka status disclaimer yang disandang selama beberapa tahun tersebut akan kembali didapat.

Dalam press rilis, BPK RI melihat Pemerintah

Kabupaten Sekadau dan Pemerintah Kabupaten Melawi telah melakukan upaya-upaya perbaikan selama tahun 2012.

Kabupaten Melawi yang memperoleh opini Tidak Wajar pada tahun sebelumnya, pada tahun 2012 telah melakukan upaya perbaikan. Yakni penerbitan SKTJM kepada Bendahara Pengeluaran yang belum menyertakan sisa UYHD,

upaya inventarisasi atas persediaan pada akhir periode, pengungkapan atas investasi permanen pada PDAM sesuai dengan metode ekuitas dan perintah kepada SKPD dan DPPKAD untuk melakukan koordinasi pengelolaan aset tetap. Usaha tersebut membuahkan hasil peningkatan opini menjadi WDP terhadap LKPD Kabupaten Melawi TA 2012. (eto) □